



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 52 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris ialah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
6. Kepala UPT ialah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
7. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
8. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan;
 - f. Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir;
 - g. Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan;
 - h. Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I;
 - i. Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II;
 - j. Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I;
 - k. Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II;

- l. Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah;
- n. Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan;
- o. Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan;
- p. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak I;
- q. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II;
- r. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik I;
- s. Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II;
- t. Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman;
- u. Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel I;
- v. Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel II;
- w. Pusat Kesehatan Masyarakat Turi;
- x. Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem;
- y. Pusat Kesehatan Masyarakat Cangkringan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pelayanan klinis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 11/Kep.KDH/A/2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 15 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

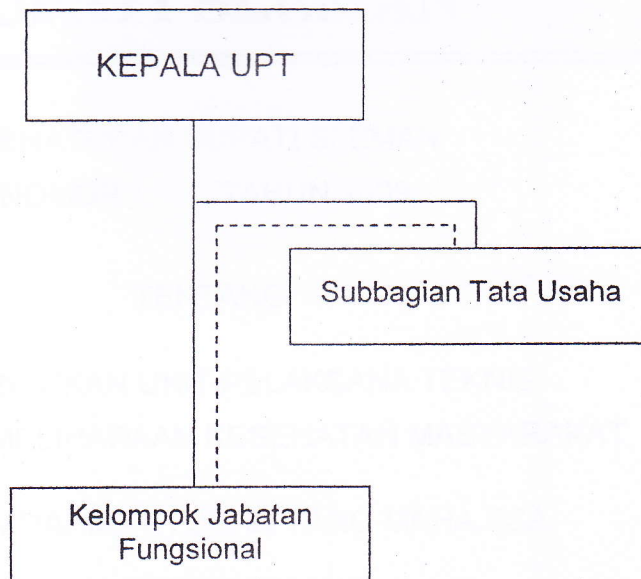
Pada tanggal 15 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO